RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN 2019

DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BANGGAI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019

DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BANGGAI

L U W U K
2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pasal 7 mewajibkan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, Dinas Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi itulah diperlukan suatu dokumen rencana kerja yang menguraikan program dan kegiatan tahunan.

Adapun penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2019 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).

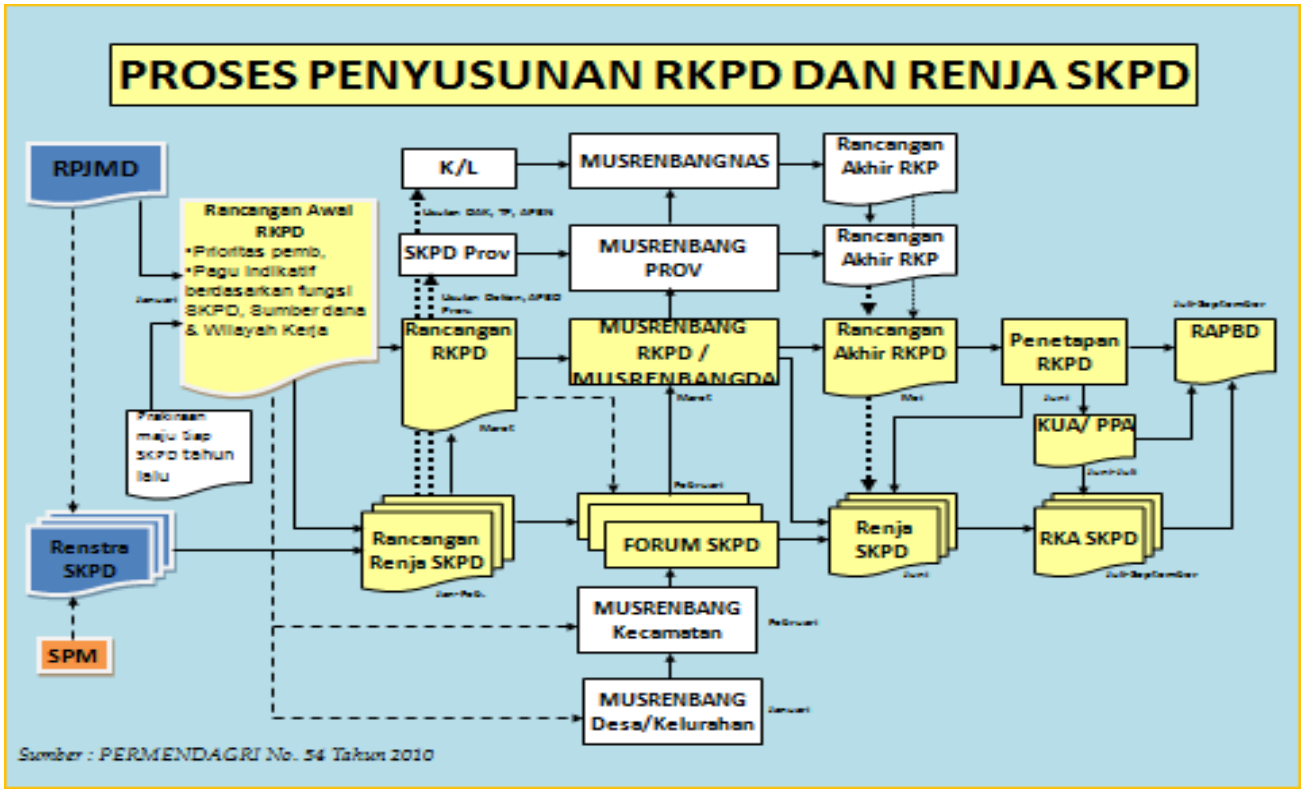

Gambar 1.
Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Bappeda merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Selain itu Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Banggai.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2018 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2298);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2018.
4. Meningkatkan Pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UKM, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perizinan, sosialisasi dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang koperasi dan UKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019.

Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;. Penyusunan Renja-SKPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-SKPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat outcome dan output.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2019 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
b. Tujuan yang akan dikehendaki
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
d. Kebijakan-kebijakan dalam melaksanakannya

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2019 juga memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian kinerja Tahun 2017 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2017
KABUPATEN BANGGAI

No	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Raelisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	5	6	7		8	9	10	11	17	18	19
1			**- Persentase Koperasi Aktif**	**53.06 %**	**22.76 %**	**21.19 %**	**21.19%**	**123%**	**32.65 %**	**67.35 %**	**100%**
			- Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	**0.02**	**0.02**	**4,23**	**0.02**	**100%**	**0.02**	**0.02**	**100%**
	2 01 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**1. Persentase Koperasi Yang Memiliki NIK**	**10,16**	**N/A**	**4,23**	**5,08**	**100%**	**8,29**	**9,12**	**100%**
	18 01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di bina	-	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	30 Koperasi	30 Koperasi	100%
	18 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah Peserta Pelatihan	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	-	-	100%

			18	03	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang difasilitasi	-	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	30 Koperasi	30 Koperasi	100%
			18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi	-	75 Koperasi	75 Koperasi	75 Koperasi	100%	50 Koperasi	50 Koperasi	100%
			18	05	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang di nilai	-	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	30 Koperasi	30 Koperasi	100%
			18	06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**100%**	12 Laporan	12 Laporan	**100%**
	2	11	18	11	Pengendalian keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi	- Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek RAT	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Koperasi yang di Dampingi	25 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Koperasi yang di Bubarkan	20 Koperasi							
	2	11	18	10	Pengelolaan Kelembagaan Koperasi dan Perizinan	- Jumlah Koperasi yang di Bina	50 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
						- Jumlah Peserta Sosialisas	50 Orang							
						Jumlah Dokuman	1 Dokumen							
						Jumlah Peserta Rapat Teknis	204 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-

	2	11	18	12	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	- Jumlah Koperasi yang di Nilai	25 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
						- Jumlah Koperasi yang di awasi	25 Koperasi							
						- Jumlah Koperasi yang di peringkat	25 Koperasi							
						2. Persentase pertumbuhan unit usaha baru koperasi	**29.41%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2	11	18	12	Pelatihan Manajemen bagi Manajer dan Pengurus Koperasi	-Jumlah Peserta yang ikut pelatihan	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						-Jumlah Peserta Magang	3 Orang							
						- Jumlah Laporan	1 Laporan							
	2	11	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	- Jumlah Koperasi yang terfasilitasi	30 Koperasi	25 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	-	-	100%
	2	11	18	14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	- Jumlah peserta temu usaha koperasi	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah data base usaha koperasi	3 Dokumen	-						
						Jumlah koperasi yang Difasilitasi Bantuan Usaha	30 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-

					-Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01	15			**Program penciptaan iklim UKM yang Kondusif**	**Persentase Usaha Mikro yang Dibina**	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		01	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
		01	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	- Junlah Sarana dan Prasarana	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	N/A	N/A	100%
	01	16			**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Persentase pengembangan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan**	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Usaha Mikro	- Jumlah Peserta Pelatihan	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	N/A	N/A	100%
		01	16	06	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	- Jumlah Peserta Pelatihan	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	75 Orang	75 Orang	100%
	2	**11**	**19**		**Program penciptaan iklim Usaha Mikro yang Kondusif**	**Persentase Usaha Mikro yang Dibina**	**71.4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2	11	19	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro	- Jumlah Peserta Sosilaisasi kebijakan tentang usaha mikro	250 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						- Jumlah Peserta Temu usaha mikro	5 Usaha mikro							
	2	11	19	05	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah dokumen pendataan usaha mikro	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

			- Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	2 11 20	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro**	**Persentase pengembangan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan**	**37.14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2 11 20 01	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan,	130 orang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Jumlah Peserta magang,	8 Orang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2 11 17	**Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Presentase Kegiatan pemasaran dan promosi produk usaha mikro di ivent kabupaten, provinsi dan nasional	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	11 17 06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah	- Jumlah Saranapemasaran		1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	11 17 09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah Peserta yang mengikuti promosi produk usaha	4 Orang	4 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	100%
	11 17 10	Pengembangan Kebijakan dan program Peningkatan Ekonomi Lokal	N/A	**-**	4 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
	2 11 17 11	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-		-	-	-				
2.											

				-Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	C	C	C	BB	BB	BB	BB
				- Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 11 01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	2 11 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000	1025 Lembar	700 Lembar	700 Lembar	700 Lembar	100%	700 Lembar	700 Lembar	100%
				Jumlah Materai 3000	1150 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	100%	500 Lembar	500 Lembar	100%
	2 11 01 02		Penyediaan Jasa Komudikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 Jaringan	1 Jaringan	100%
				Jumlah Jaringan Air	3 Jaringan	3 Jaringan	3 Jaringan	3 Jaringan	100%	3 Jaringan	3 Jaringan	100%
				Jumlah Jaringan Internet	1 Jaringan	1 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	100%	1 Jaringan	1 Jaringan	100%
	2 11 01 06		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
				Jumlah Kendaraan Roda 2	16 Unit	13 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%
	2 11 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Peralatan kebersihan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%
				Jumlah tenaga kebersihan	4 Orang	4 Orang	4 orang	4 orang	100%	4 Orang	4 Orang	100%

	2	11	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	21 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	100%	21 Jenis	21 Jenis	100%
	2	11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah foto copy	50000 Lembar	46250 Lembar	46250 Lembar	46250 Lembar	100%	49000 Lembar	49000 Lembar	100%
						Jumlah Cetak Buku	15 Buku	260 Buku	260 Buku	260 Buku	100%	10 Buku	10 Buku	100%
	2	11	01	12	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
						Jumlah Daya Listrik		10500 KVA	15500 KVA	15500 KVA	100%			100%
	2	11	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	1 Terbitan	1 Terbitan	1 Terbitan	1 Terbitan	100%	1 Terbitan	1 Terbitan	100%
	2	11	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan	371 Dos	400 Dos	400 Dos	400 Dos	100%	371 Dos	371 Dos	100%
						Jumlah Minuman	200 Dos	160 Dos	160 Dos	160 Dos	100%	200 Dos	200 Dos	100%
	2	11	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah biaya rapat keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	2	11	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah biaya rapat kedalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	2	11	01	20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga adminitrasi perkantoran	11 Orang	Jumlah Tenaga Adimistrasi	-	-	100%	11 Orang	11 Orang	100%

	2	**11**	**01**	**22**	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga adminitrasi perkantoran	-	18 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	-	-	100%
	2	**11**	**02**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**PersentaseSarana Prasarana apratur dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	2	**11**	**02**	**05**	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanal	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	-
	2	**11**	**02**	**07**	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	2	**11**	**02**	**09**	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Unit	7 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
	2	**11**	**02**	**10**	pengadaan meubelair	jumlah mebulair	4 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	2	**11**	**02**	22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	2	**11**	**02**	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	jumlah kendaraan kantor	18 Unit	14 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	100%
	2	**11**	**02**	26	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
	2	**11**	**02**	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah biaya peralatan kantor	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%

					Persentase Peningkatan Displin ASN								
	2	**11**	**03**		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat Kepatuhan displinan PNS**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	2	**11**	**03**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian	-	45 Pasang	98 Pasang	98 Pasang	100%	98 Pasang	98 Pasang	100%
	2	**11**	**03**	03	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	jumlah pakaian	49 Pasang	-	-	-	-	-	-	-
		11	**03**	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian	49 Pasang	90 Pasang	98 Pasang	98 Pasang	100%	98 Pasang	98 Pasang	100%
	2	**11**	**04**		**Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS**	**Persentase Usulan ASN Pensiun yang di proses**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	2	**11**	**04**	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah PNS yang pensiun	2 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
	2	**11**	**05**		**Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	2	**11**	**05**	01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang	3 Orang	2 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	4 Orang	100%
	2	**11**	**05**	06	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	2	**11**	**06**		**Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat Ketepatan waktu penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	2	**11**	**06**	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	2	**11**	**06**	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2	**11**	**06**	04	penyususan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2	**11**	**06**	05	penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	2	**11**	**08**		**Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan**	**Persentase program dan kegiatan dalam dokumen renja terhadap renstra**	**100%**	**N/A**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2	**11**	**08**	02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Laporan	12 Laporan	NA	-	-	-	-	-	-

Luwuk, 2018

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BANGGAI

RUDI PURWANA K BULLAH, S. Sos
NIP. 19710601 199903 1 005

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi SKPD.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	
1	2	3	4	6	7	8	9	9	11	12	13	14	14	16	17	18
1.	Persentase Koperasi Aktif			21.19 %	32.65 %	53.06 %	67.35 %	81.63 %	21.19 %	32.65 %	53.06 %	67.35 %	81.63 %	21.19 %	32.65 %	
2.	Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	Qk	100%	100%	
3.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			C	BB	BB	A	A	C	BB	BB	A	A	BB	BB	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, Dinas Koperasi dan UKM mempunya permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Secara internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pengelolakegiatan.
3. Kurannya tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional.
4. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
5. Kurannya inovasi dan kualitas produk KUMKM
6. Kurannya permodalan Koperasi dan UMKM
7. Belum adanya pusat promosi yang khusus mengimformasikan secara luas produk unggulan daerah.
8. Rendanya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak global.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai mempunyai isu-isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembagunan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banggai mendatang antara lain sebagai :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan , manajemen koperasi, agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuaidengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi insentif sehingga menjadi semakin baik.
2. Meningkatkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM, dalam upaya peningkatan potensi perekonomian daerah dan serta perluasan kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengangguran.
3. Meningkatkan daya saing produk KUMKM dalam upaya peningkatan potensi perekonomian daerah dengan upaya yang mendorong peningkatan daya saing kualitas produk barang/jasa.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengelola koperasi dan UMKM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 sebagaimana tabel 2.3. berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANGGAI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		**1. Persentase Koperasi yang memiliki sertifikat NIK**	**10.59 %**	**760,000,000**	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		**1. Persentase Koperasi yang memiliki sertifikat NIK**	**10,.59 %**	**760,000,000**	
	Pengendalian keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek RAT	50 Orang	40,000,000	Pengendalian keanggotaan dan Penerapan Peraturan Ko perasi	Kab. Banggai	- Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek RAT	50 Orang	40,000,000	
		Kab. Banggai	Jumlah Koperasi yang di Dampingi	25 Koperasi	80,000,000		Kab. Banggai	Jumlah Koperasi yang di Dampingi	25 Koperasi	80,000,000	
		Kab. Banggai	Jumlah Koperasi yang di Bubarkan	20 Koperasi	45,000,000		Kab. Banggai	Jumlah Koperasi yang di Bubarkan	20 Koperasi	45,000,000	
	Pengelolaan Kelembagaan Koperasi dan Perizinan	Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di Bina	50 Koperasi	135,000,000	Pengelolaan Kelembagaan Koperasi dan Perizinan	Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di Bina	50 Koperasi	135,000,000	
		Kab. Banggai	- Jumlah Peserta Sosialisas	50 Orang	30,000,000		Kab. Banggai	- Jumlah Peserta Sosialisas	50 Orang	30,000,000	
		Kab. Banggai	Jumlah Dokuman	1 Dokumen	35,000,000		Kab. Banggai	Jumlah Dokuman	1 Dokumen	35,000,000	
		Kab. Banggai	Jumlah Peserta Rapat Teknis	204 Koperasi	250,000,000		Kab. Banggai	Jumlah Peserta Rapat Teknis	204 Koperasi	250,000,000	

	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di Nilai	50 Orang	65,000,000	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di Nilai	50 Orang	65,000,000		
		Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di awasi	25 Koperasi	50,000,000		Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di awasi	25 Koperasi	50,000,000		
		Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di peringkat	20 Koperasi	30,000,000		Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang di peringkat	20 Koperasi	30,000,000		
			2. Persentase pertumbuhan unit usaha baru koperasi	12.71 %	**483,000,000**			**2. Persentase pertumbuhan unit usaha baru koperasi**	12.71 %	**483,000,000**		
	Pelatihan Manajemen bagi Manajer dan Pengurus Koperasi	Kab. Banggai	-Jumlah Peserta yang ikut pelatihan	50 Orang	180,000,000	Pelatihan Manajemen bagi Manajer dan Pengurus Koperasi	Kab. Banggai	-Jumlah Peserta yang ikut pelatihan	50 Orang	180,000,000		
		Kab. Banggai	-Jumlah Peserta Magang	1 Dokumen	53,000,000		Kab. Banggai	-Jumlah Peserta Magang	1 Dokumen	53,000,000		
		Kab. Banggai	- Jumlah Laporan	204 Koperasi	25,000,000		Kab. Banggai	- Jumlah Laporan	204 Koperasi	25,000,000		
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang terfasilitasi	25 Koperasi	59,200,000	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah Koperasi yang terfasilitasi	25 Koperasi	59,200,000		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah peserta temu usaha koperasi	25 Koperasi	35,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	Kab. Banggai	- Jumlah peserta temu usaha koperasi	25 Koperasi	35,000,000		
		Kab. Banggai	Jumlah data base usaha koperasi	25 Koperasi	29,000,000		Kab. Banggai	Jumlah data base usaha koperasi	25 Koperasi	29,000,000		
		Kab. Banggai	Jumlah koperasi yang Difasilitasi Bantuan Usaha	**29.41%**	101,800,000		Kab. Banggai	Jumlah koperasi yang Difasilitasi Bantuan Usaha	**29.41%**	101,800,000		
	Program penciptaan iklim Usaha Mikro yang Kondusif		**Persentase Usaha Mikro yang Dibina**	**71.4**	**448,670,000**	**Program penciptaan iklim Usaha Mikro yang Kondusif**		**Persentase Usaha Mikro yang Dibina**	**71.4**	**448,670,000**		
	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro	Kab. Banggai	- Jumlah Peserta Sosilaisasi kebijakan tentang usaha mikro	250 Orang	168,141,000	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro	Kab. Banggai	- Jumlah Peserta Sosilaisasi kebijakan tentang usaha	250 Orang	168,141,000		

								mikro			
		Kab. Banggai	- Jumlah Peserta Temu usaha mikro	5 Usaha mikro	70,000,000		Kab. Banggai	- Jumlah Peserta Temu usaha mikro	5 Usaha mikro	70,000,000	
	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	Kab. Banggai	- Jumlah dokumen pendataan usaha mikro	4 Dokumen	140,529,000	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	Kab. Banggai	- Jumlah dokumen pendataan usaha mikro	4 Dokumen	140,529,000	
		Kab. Banggai	- Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha	1 Unit	70,000,000		Kab. Banggai	- Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha	1 Unit	70,000,000	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro		**Persentase pengembangan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan**	**37.14**	**693,000,000**	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro**		**Persentase pengembangan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan**	**37.14**	**693,000,000**	
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kab. Banggai	Jumlah Peserta pelatihan,	130 orang	543,000,000	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kab. Banggai	Jumlah Peserta pelatihan,	130 orang	543,000,000	
		Luar Daerah	Jumlah Peserta magang,	8 Orang	150,000,000		Luar Daerah	Jumlah Peserta magang,	8 Orang	150,000,000	
	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		**Presentase Kegiatan pemasaran dan promosi produk usaha mikro di ivent kabupaten, provinsi dan nasional**	**100%**	**316,330,000**	**Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**		**Presentase Kegiatan pemasaran dan promosi produk usaha mikro di ivent kabupaten, provinsi dan nasional**	**100%**	**316,330,000**	
	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Kab. Banggai dan Provinsi dan Pusat	Jumlah Peserta yang mengikuti promosi produk usaha		316,330,000	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Kab. Banggai dan Provinsi dan Pusat	Jumlah Peserta yang mengikuti promosi produk usaha		316,330,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019.

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut, telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Atarwilayah, berorientasi pada peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah**.**
5. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan salah satunya melalui implementasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) yang *launching* nya telah dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada akhir tahun lalu. Program ini tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik, tetapi juga

untuk pemberdayaan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan pemberian modal.

6. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Banggai yang akan mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangat memperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan.
7. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir 2015 akan berdampak pada penambahan jumlah lapangan kerja di daerah sehingga penyerapan tenaga kerja akan terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam.
8. Fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai harga keekonomiannya sehingga hal tersebut akan memicu meningkatnya inflasi. Mengingat peranan BBM sebagai komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa ”efek domino” ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi yang selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Selain dari komponen *administered prices* tersebut, resiko meningkatnya inflasi pada tahun 2015 juga masih berasal dari *volatile food* yang terjadi sebagai akibat faktor cuaca maupun penurunan produksi.
9. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 terdapat beberapa inovasi perencanaan kedepan yaitu : (a) Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya, (b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (c) Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, (d) Kemampuan dalam menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan, (e) Pemantapan komunikasi publik dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan, (f) Pemantapan peran Dinas Koperasi dan UKM selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan. Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah, jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran.

Beberapa usulan program dan kegiatan dari para pemaangku kepentingan baik dari usulan Dewan maupun Masyrakat yang belum dapat di akomodir karena terbatasi dengan peraturan permendagri no 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah namun untuk merespon kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka di berikan kegiatan yang dapat membina dan memberdayakan masyarakat yaitu pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis peningkatan ketrampilan

. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang

komprehensif selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Banggai khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banggai sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. BANGGAI

No	Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	**2 11 19**	**Program penciptaan iklim Usaha Mikro yang Kondusif**			**1,929,000,000**	
	2 11 19 05	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro - Bantuan Usaha	Desa Luok	- Jumlah usaha mikro	50,000,000	Usulan Dewan
			Desa Bantayan		50,000,000	Usulan Dewan
			Kec. Luwuk Timur	- Peralatan Kue	200,000,000	Usulan Dewan
			Desa Bukit Makarti	- Peraltan Perbengkelan	65,000,000	
			Kecamatan Toili	- Alat Pembuat Kripik	50,000,000	Usulan Dewan
			Desa Bolobungkang	Alat Pembuatan Abon	15,000,000	Usulan Masyarakat
			Desa Bahingin	- Jumlah Orang Penerima Bantuan	50,000,000	Usulan Masyarakat
			Desa Sepe	-Bantuan Peralatan dan Permodalan usaha Mikro	20,000,000	Usulan Masyarakat
			Desa Tongke	- Peralatan Las	50,000,000	Usulan Masyarakat
			Kel. Kilongan	-Bantuan Peralatan dan Permodalan usaha Mikro	40,000,000	Usulan Masyarakat
			Desa Lenyek	-Bantuan Peralatan usaha Mikro	80,000,000	Usulan Masyarakat
			Kec. Nambo	-Bantuan Peralatan usaha Mikro	1,000,000,000	Usulan Masyarakat
			Desa Padungnyo	-Bantuan Peralatan usaha Mikro	259,000,000	Usulan Masyarakat
2	**2 11 20**	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro**			**615,000,000**	
	2 11 20 01	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Desa Cendana Pura	Jumlah Peserta pelatihan,	80,000,000	Usulan Dewan
			Kel. Cendana	Jumlah Peserta pelatihan,	80,000,000	Usulan Dewan
			Ds. Mansahang	Jumlah Peserta pelatihan,	80,000,000	Usulan Dewan
			Ds. Rusa Kencana	Jumlah Peserta pelatihan,	80,000,000	Usulan Dewan
			Ds. Slamet Sumberharjo	Jumlah Peserta pelatihan,	80,000,000	Usulan Dewan
			Ds. Argomulyo	Jumlah Peserta pelatihan,	80,000,000	Usulan Dewan
			Desa Benteng	- Jumlah Kelompok Usaha Mikro	60,000,000	Usulan Masyarakat
			Kec. Nambo	- Jumlah Peserta Pelatihan	75,000,000	Usulan Masyarakat
Jumlah					**2,544,000,000**	

Luwuk, September 2018

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN BANGGAI

RUDI PURWANA K BULLAH, S. Sos

NIP. 19710601 199903 1 005

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2016 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi bappeda Kabupaten Banggai dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupate Banggai Tahun 2019

Tujuan dan sasaran Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dalam rencana program/kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.
b. Menjadi Petunjuk Untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun anggaran 2019.
c. Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh Bidang dan Sekretriat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan karena adanya kebijakan publik.
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2019

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah OPD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu : a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Banggai yaitu " Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya" yang kemudian dijabarkan tujuan dan sasaran kinerja. b. Proritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM yaitu : Peningkatan kualitas, kontinuitas dan peluang pasar produk lokal, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur. c. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan Koperasi dan UMKM dengan capaian target yang telah ditentukan. d. Pengentasan Kemiskinan dengan Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas daerah

dan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mereduksi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. e. Peningkatan dan penguatan stabilitas ekonomi daerah tertinggal seperti Pembinaan Koperasi di daerah P2WKSS f. Beberapa kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan karena ada penggabungan beberapa kegiatan yang memiliki indikator kegiatan yang hampir sama dan memiliki substansi pelaksanaan yang sama juga. Selain itu ada beberapa penyesuaian terhadap pagu anggaran beberapa kegiatan tetapi tidak berbeda secara total anggaran.

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan adalah *tujuan bersama,* Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program–program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai 2019 memiliki peran dalam skema perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai. Hal ini mengharuskan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai mampu menganalisa capaian kinerja yang masih belum tercapai sehingga pada Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Koprasi dan UKM Kabupaten Banggai dapat difokuskan untuk pencapaian kondisi RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dalam jangka 1 tahun telah merencanakan program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja untuk mendukung RPJMD Kabupaten Banggai dan mencapai target yang diharapkan serta dukungan pendanaan yang di gambarkan pada tabel berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BANGGAI

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. BANGGAI

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16
2 01 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**1. Persentase Koperasi yang memiliki sertifikat NIK**	**N/A**	**10,16**	**760,000,000**	APBD		**11,95**	**874,000,000**
2 11 18 11	Pengendalian keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi	- Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek RAT	Kab. Banggai	50 Orang	40,000,000	APBD		50 Orang	46,000,000
		Jumlah Koperasi yang di Dampingi	Kab. Banggai	25 Koperasi	80,000,000	APBD		25 Koperasi	92,000,000
		Jumlah Koperasi yang di Bubarkan	Kab. Banggai	20 Koperasi	45,000,000	APBD		20 Koperasi	51,750,000
2 11 18 10	Pengelolaan Kelembagaan Koperasi dan Perizinan	- Jumlah Koperasi yang di Bina	Kab. Banggai	50 Koperasi	135,000,000	APBD		50 Koperasi	162,000,000
		- Jumlah Peserta Sosialisas	Kab. Banggai	50 Orang	30,000,000	APBD		50 Orang	33,000,000
		Jumlah Dokuman	Kab. Banggai	1 Dokumen	35,000,000	APBD		1 Dokumen	42,000,000
		Jumlah Peserta Rapat Teknis	Kab. Banggai	204 Koperasi	250,000,000	APBD		204 Koperasi	280,500,000
2 11 18 12	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	- Jumlah Koperasi yang di Nilai	Kab. Banggai	25 Koperasi	65,000,000	APBD		25 Koperasi	74,750,000
		- Jumlah Koperasi yang di awasi	Kab. Banggai	25 Koperasi	50,000,000	APBD		25 Koperasi	57,500,000
		- Jumlah Koperasi yang di peringkat	Kab. Banggai	25 Koperasi	30,000,000	APBD		25 Koperasi	34,500,000
		2. Persentase pertumbuhan unit usaha baru koperasi	Kab. Banggai	**29.41%**	**483,000,000**	APBD		**30.39%**	**531,300,000**
2 11 18 12	Pelatihan Manajemen bagi Manajer dan Pengurus Koperasi	-Jumlah Peserta yang ikut pelatihan	Kab. Banggai	50 Orang	180,000,000	APBD		APBD	198,000,000
		-Jumlah Peserta Magang	Kab. Banggai	3 Orang	53,000,000	APBD		3 Orang	58,300,000
		- Jumlah Laporan	Kab. Banggai	1 Laporan	25,000,000	APBD		APBD	27,500,000
2 11 18 06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	- Jumlah Koperasi yang terfasilitasi	Kab. Banggai	30 Koperasi	59,200,000	APBD		30 Koperasi	65,120,000
2 11 18 14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	- Jumlah peserta temu usaha koperasi	Kab. Banggai	25 Orang	35,000,000	APBD		25 Orang	38,500,000
		Jumlah data base usaha koperasi	Kab. Banggai	3 Dokumen	29,000,000	APBD		3 Dokumen	31,900,000
		Jumlah koperasi yang Difasilitasi Bantuan Usaha	Kab. Banggai	30 Koperasi	101,800,000	APBD		APBD	111,980,000
2 11 19	**Program penciptaan iklim Usaha Mikro yang Kondusif**	**Persentase Usaha Mikro yang Dibina**	Kab. Banggai	**71.4**	**448,670,000**	APBD		**77.1**	476,970,500

2	11	19	01	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro	- Jumlah Peserta Sosilaisasi kebijakan tentang usaha mikro	Kab. Banggai	250 Orang	168,141,000	APBD		270 Orang	193,362,150
					- Jumlah Peserta Temu usaha mikro	Kab. Banggai	5 Usaha mikro	70,000,000	APBD		APBD	80,500,000
2	11	19	02	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah dokumen pendataan usaha mikro	Kab. Banggai	4 Dokumen	140,529,000	APBD		4 Dokumen	127,108,350
					- Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha	Kab. Banggai	1 Unit	70,000,000	APBD		1 Unit	76,000,000
2	**11**	**20**		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro**	**Persentase pengembangan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan**	Kab. Banggai	**37.14**	**693,000,000**	APBD		**42.86**	796,950,000
2	**11**	**20**	01	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan,	Kab. Banggai	130 orang	543,000,000	APBD		150 Orang	624,450,000
					Jumlah Peserta magang,	Kab. Banggai	8 Orang	150,000,000	APBD		APBD	17,250,000
2	**11**	**17**		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Presentase Kegiatan pemasaran dan promosi produk usaha mikro di ivent kabupaten, provinsi dan nasional	Dalam daerah, Provinsi dan Pusat	**100%**	**316,330,000**	APBD		**100%**	363,779,500
	11	**17**	**06**	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah	- Jumlah Sarana pemasaran	Kab. Banggai		**-**	APBD			-
	11	**17**		Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah Peserta yang mengikuti promosi produk usaha	Kab. Banggai	4 Orang	316,330,000	APBD		4 Orang	363,779,500
	11	**17**	**10**	Pengembangan Kebijakan dan program Peningkatan Ekonomi Lokal	N/A	Kab. Banggai	**-**	**-**	APBD		**-**	-
2	**11**	**17**	**11**	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	Kab. Banggai	-	-	APBD		-	**-**
2	**11**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran**	Kab. Banggai	**100%**	**1,151,295,000**	APBD		**100%**	1,325,189,250
2	**11**	**01**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000	Kab. Banggai	1408 Lembar	8,450,000	APBD		1705 Lembar	10,235,000
					Jumlah Materai 3000	Kab. Banggai	1150 Lembar	3,450,000	APBD		1150 Lembar	3,450,000
2	**11**	**01**	**02**	Penyediaan Jasa Komudikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik	Kab. Banggai	1 Jaringan	60,000,000	APBD		1 Jaringan	66,000,000
					Jumlah Jaringan Air	Kab. Banggai	3 Jaringan	17,400,000	APBD		3 Jaringan	24,240,000
					Jumlah Jaringan Internet	Kab. Banggai	1 Jaringan	10,800,000	APBD		1 Jaringan	10,800,000
2	**11**	**01**	**06**	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4	Kab. Banggai	2 Unit	4,400,000	APBD		3 Unit	6,000,000
					Jumlah Kendaraan Roda 2	Kab. Banggai	16 Unit	5,000,000	APBD		16 Unit	5,200,000
2	**11**	**01**	**08**	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Peralatan kebersihan	Kab. Banggai	9 Jenis	7,000,000	APBD		9 Jenis	15,250,000
					Jumlah tenaga kebersihan	Kab. Banggai	4 Orang	48,000,000	APBD		4 Orang	48,000,000
2	**11**	**01**	**10**	Penyediaan Alat Tulis	Jumlah alat tulis kantor	Kab. Banggai	21 Jenis	30,000,000	APBD		21 Jenis	34,500,000

				Kantor								
2	11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah foto copy	Kab. Banggai	50000 Lembar	20,000,000	APBD		60163 Lembar	24,065,000
					Jumlah Cetak Buku	Kab. Banggai	15 Buku	7,100,000	APBD		15 Buku	7,100,000
2	11	01	12	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	Kab. Banggai	5 jenis	4,400,000	APBD		5 jenis	5,060,000
					Jumlah Daya Listrik	Kab. Banggai	-	-	APBD		-	-
2	11	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Kab. Banggai	1 Terbitan	3,000,000	APBD		1 Terbitan	3,450,000.00
2	11	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan	Kab. Banggai	371 Dos	11,095,000	APBD		400 Dos	14,000,000
					Jumlah Minuman	Kab. Banggai	311 Dos	3,895,000	APBD		259 Dos	3,238,500
2	11	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	Pusat ,Provinsi dan Kabupaten	13 Kali	318,705,000	APBD		16 Kali	366,510,750
2	11	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam Daerah	Kab. Banggai	120	324,000,000	APBD		219 Kali	37,380,000
2	11	01	20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga adminitrasi perkantoran	Kab. Banggai	11 Orang	264,600,000	APBD		11 Orang	304,290,000
2	11	01	22	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga adminitrasi perkantoran	Kab. Banggai	-	-	APBD		-	-
2	11	02		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**PersentaseSarana Prasarana apratur dalam kondisi baik**	Kab. Banggai	**100%**	**364,505,000**	APBD		**100%**	**314,155,750**
2	11	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanal	Jumlah Unit Kendaraan roda 4	Kab. Banggai	1 Unit	150,000,000	APBD		-	-
					Jumlah Unit Kendaraan roda 2	Kab. Banggai	-	-	APBD		3 Unit	52,474,500
2	11	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Kab. Banggai	2 Unit	6,000,000	APBD		4 Unit	21,900,000
2	11	02	09	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutukan	Kab. Banggai	3 Unit	48,000,000	APBD		3 Unit	55,200,000
2	11	02	10	pengadaan meubelair	Jumlah mebulair Kantor	Kab. Banggai	4 Unit	16,000,000	APBD		4 Unit	18,400,000
2	11	02	22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	Kab. Banggai	1 unit	90,000,000	APBD		1 unit	103,500,000
2	11	02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan kantor Roda 4	Kab. Banggai	2 Unit	22,000,000	APBD		3 Unit	271,000,900
					Jumlah kendaraan kantor Roda 4	Kab. Banggai	12 Unit	12,000,000	APBD		12 Unit	12,000,000
2	11	02	26	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Kab. Banggai	14 Unit	5,880,000	APBD		14 Unit	6,762,000
2	11	02	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Kab. Banggai	30 Unit	14,625,000	APBD		30 Unit	16,818,750
2	11	03		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat Kepatuhan displinan PNS**	Kab. Banggai	**100%**	**98,000,000**	APBD		**100%**	**107,800,000**
2	11	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian	Kab. Banggai	-	-	APBD		98 Pasang	53,900,000
2	11	03	03	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	jumlah pakaian	Kab. Banggai	49 Pasang	49,000,000	APBD		50 Pasang	53,900,000
	11	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian	Kab. Banggai	49 Pasang	49,000,000	APBD		-	-
2	11	04		**Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS**	**Persentase Usulan ASN Pensiun yang di proses**	Kab. Banggai	**100%**	**8,000,000**	APBD		**100%**	**8,800,000**
2	11	04	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah PNS yang pensiun	Kab. Banggai	2 Orang	8,000,000	APBD		2 Orang	8,800,000

2	**11**	**05**		**Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	Kab. Banggai	**100%**	**34,000,000**	APBD		**100%**	37,400,000
2	**11**	**05**	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN	Kab. Banggai	3 Orang	18,000,000	APBD		4 Orang	19,800,000
2	**11**	**05**	06	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Jumlah dokumen	Kab. Banggai	3 Dokumen	16,000,000	APBD		3 Dokumen	17,600,000
2	**11**	**06**		**Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat Ketepatan waktu penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan**	Kab. Banggai	**100%**	**99,000,000**	APBD		**100%**	**112,825,000**
2	**11**	**06**	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Kab. Banggai	2 Laporan	13,000,000	APBD		2 Laporan	17,160,000
2	**11**	**06**	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan	Kab. Banggai	1 Laporan	8,000,000	APBD		1 Laporan	11,040,000
2	**11**	**06**	04	penyususan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	Kab. Banggai	1 Laporan	14,000,000	APBD		1 Laporan	19,320,000
2	**11**	**06**	05	penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Banggai	8 Dokumen	64,000,000	APBD		8 Dokumen	87,870,000
2	**11**	**08**		**Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan**	**Persentase program dan kegiatan dalam dokumen renja terhadap renstra**	Kab. Banggai	**100%**	**44,200,000**	APBD		**100%**	**56,929,600**
2	**11**	**08**	02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Laporan	Kab. Banggai	12 Laporan	44,200,000	APBD		12 Laporan	56,929,600
								4,500,000,000				**5,000,000,000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2018, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Dinas Koperasi dan UKM wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2018. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Banggai.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Luwuk, 2018

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN BANGGAI

RUDI PURWANA K BULLAH, S. Sos
Pembina Tkt I
NIP. 19710601 199903 1 005